Paradigma, Volume 13, Number 2, 2024, pp. 161-170

Motif Warga Miskin Dalam Penolakan Program Padat Karya di Surabaya

Angel Kurnia[1*] dan Pambudi Handoyo[2]
[1,2]Program Studi Sosiologi, Jurusan Ilmu Sosial, FISIP-Unesa
angelkurnia.20057@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The Padat Karya Program aims to alleviate poverty through the provision of training and employment by the Surabaya government. However, in the Kelurahan Ujung area, participation in this program remains low, with many residents rejecting it. This study aims to identify the reasons why poor residents in Kelurahan Ujung accept or reject the Padat Karya Program. The methodology used is qualitative, with a phenomenological approach based on Alfred Schutz's theory. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the rejection of the Padat Karya Program is influenced by several factors. "Because motives" include distrust of the program's effectiveness, urgent economic pressures, accuracy of information, government incentives, and job status. Meanwhile, "in-order-to motives" encompass the desire for job flexibility, concerns about job stability, the need to manage household responsibilities, hopes for better employment opportunities, and a preference for other types of assistance that are considered more suitable. Residents prefer job flexibility and stability as well as cash assistance or programs perceived as more immediately beneficial. These findings highlight the need to adjust the Padat Karya Program to better meet the needs and expectations of the community, in order to enhance program participation and effectiveness.

Program Padat Karya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan pelatihan dan pekerjaan oleh pemerintah Surabaya. Namun, di Kelurahan Ujung, partisipasi terhadap program ini masih rendah, dengan banyak warga menolak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan warga miskin di Kelurahan Ujung dalam menerima atau menolak Program Padat Karya. Metode yang dipakai, yakni kualitatif dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan warga terhadap Program Padat Karya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Motif sebab (*because motive*) termasuk ketidakpercayaan terhadap efektivitas program, tekanan ekonomi mendesak, kejelasan informasi, dorongan dari pemerintah, dan status pekerjaan. Sedangkan motif tujuan (*in-order to motive*) meliputi keinginan akan fleksibilitas kerja, kekhawatiran tentang stabilitas pekerjaan, kebutuhan untuk mengurus rumah tangga, harapan untuk pekerjaan yang lebih baik, dan keinginan akan bantuan lain yang lebih sesuai. Warga lebih memilih fleksibilitas dan stabilitas pekerjaan serta bantuan tunai atau program yang dianggap lebih langsung bermanfaat. Temuan ini menunjukkan perlunya penyesuaian Program Padat Karya agar lebih memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat, guna meningkatkan partisipasi dan efektivitas program.

Keywords: Poverty; Padat Karya; Empowerment; Motive; Social Resistance.

1. Pendahuluan

Di perkotaan seperti halnya di Surabaya terdapat beberapa faktor yang memicu kemiskinan salah satu diantaranya yaitu, terlalu banyak masyarakat desa yang memilih urbanisasi. Seiring dengan urbanisasi yang terus berlangsung di Indonesia maka berdampak juga pada peningkatan jumlah absolut masyarakat miskin perkotaan, dari 45% tingkat urbanisasi menjadi 70% diproyeksikan di tahun 2030, yang mana hal ini menunjukkan urgensi kelompok masyarakat miskin perkotaan menjadi sasaran penting dari kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah. Selanjutnya, terdapat beberapa karakteristik yang membedakan antara masyarakat perkotaan yang miskin dengan yang tidak miskin, yaitu terletak pada ketenagakerjaan, pendidikan, akses terhadap layanan, kondisi

perumahan, dan sebagainya. Lebih lanjut, kepala rumah tangga keluarga yang tidak miskin kemungkinan besar merupakan karyawan yang mendapatkan upah sementara kepala rumah tangga miskin bekerja sendiri, sehingga menunjukkan bahwa terdapat indikasi kepala rumah tangga miskin memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi untuk bekerja di sektor informal. Dibandingkan dengan masyarakat yang tidak miskin, masyarakat miskin perkotaan juga memiliki pendidikan yang lebih rendah, di mana satu pertiganya memiliki pendidikan kurang dari pendidikan wajib (Sekolah Dasar-Sekolah Menengah Atas/Kejuruan). Masyarakat miskin perkotaan mengalami beberapa tantangan, seperti pendapatan yang tidak memadai, biaya sekolah, dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena lapangan pekerjaan yang terbatas (Amsal, 2018).

Keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan tingkat pengangguran menjadi tinggi. Pengangguran merupakan keadaan di mana individu tidak memiliki pekerjaan karena tidak mendapatkan kesempatan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Indonesia seringkali menghadapi masalah tingkat pengangguran yang besar dikarenakan besarnya jumlah penduduk sementara lapangan pekerjaan terbatas, yang mana dapat dilihat penduduk usia produktif mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tinggi menyebabkan sektor formal ataupun informal tidak dapat menyerap tenaga kerja atau usia produktif secara penuh. Ketimpangan antara jumlah angkatan kerja baru dengan jumlah tersedianya kesempatan kerja baru menghasilkan masalah pengangguran (Brodjonegoro & et.al., 2007). Sementara itu, bedasarkan tabel 1 terkait laporan Badan Pusat Statistik, Kota Surabaya memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,76% di tahun 2023, yang mana angka tersebut tergolong tinggi karena rata-rata TPT di Jawa Timur sendiri hanya sebesar 4,88% (BPS, 2023).

Untuk menanggulangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Program-program ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kesehatan. Pada masa kepemimpinan Pak Soekarwo menjadi gubernur Jawa Timur, terdapat sejumlah program penanggulangan kemiskinan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program yang diimplementasikan antara lain adalah program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat), pemberian BLT, JPES, beasiswa bagi anak-anak keluarga miskin, dan sebagainya. Namun, program-program tersebut cenderung bersifat *charity* atau sedekah (shodaqoh), yang mana tujuan utamanya hanya untuk meringankan beban keluarga miskin tetapi belum memberikan solusi kepada mereka agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Program yang bersifat *charity* ini berpotensi meningkatkan rasa *fatalistik* dan mengurangi mekanisme *self-help* yang telah dimiliki masyarakat miskin selama ini. Salah satu kemampuan mekanisme *self-help* masyarakat miskin adalah kemampuan mengembangkan pekerjaan atau usaha dengan melibatkan seluruh anggota keluarga miskin. Lebih dari itu, program semacam itu diindikasi dapat membuat masyarakat miskin semakin ketergantungan pada subsidi dan bantuan dari pihak lain. Berdasarkan alasan tersebut, program-program yang bersifat *charity* menuai pro-kontra (Sadewo, Legowo, Supriyanta, & Harianto, 2012).

Berdasarkan data yang telah didapatkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan anggaran pada Perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2015 menjadikan Program Padat Karya sebagai fokus utama. Keberlanjutan program ini dianggap sebagai suatu keharusan, tidak hanya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi juga sebagai strategi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di tengah perlambatan ekonomi. Program Padat Karya dinilai dapat memberikan dampak positif

dalam meningkatkan daya beli dan mengurangi kemiskinan, serta berperan sebagai pendorong ekonomi melalui belanja pemerintah di sektor produksi barang dan jasa (Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2015).

Program Padat Karya dirancang untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah, yang mana program ini memiliki karakteristik produktif dengan kegiatan berisi terkait pemanfaatan teknologi lokal, tenaga kerja, dan sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinaan dan pengangguran, serta berupaya untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dan mempertahankan daya beli masyarakat. Program Padat Karya tidak hanya berfokus pada sektor konstruksi, tetapi juga melibatkan sektor pertanian, pariwisata, dan lingkungan hidup. Dengan melibatkan berbagai sektor ini, diharapkan akan tercapai dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Di Surabaya sendiri Program Padat Karya mulai diimplementasikan sejak tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 119 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Padat Karya Pada Urusan Pemerintahan di Bidang Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Program Padat Karya di Kota Surabaya, yang mana telah ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2023 dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai pemrakasa. Program Padat Karya diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui intervensi pekerjaan yang ditawarkan, akan tetapi terdapat sebagian besar dari masyarakat menolak untuk melanjutkan dan tergabung dalam Program Padat Karya.

Kelurahan ujung memiliki tingkat penolakan intervensi Program Padat Karya oleh warga miskin yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan kelurahan lain. Di sisi lain, Kelurahan Ujung menempati posisi ketiga sebagai kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Surabaya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti motif dibalik penolakan intervensi Program Padat Karya oleh warga miskin di Kelurahan Ujung. Peneliti menggunakan teori fenomenologi menurut perspektif Alfred Schutz untuk menganalisis motif dari penolakan warga miskin terhadap intervensi Program Padat Karya.

2. Kajian Pustaka

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil penelitian terdahulu yang ditulis oleh Alfonsus Rahanratu Lafina, dkk. (2023) dengan judul "Implementasi Program Padat Karya dalam Perspektif Collaborative Governance di Kelurahan Manyar Sabrangan Kota Surabaya". Penelitian ini menyoroti pelaksanaan Program Padat Karya terhadap MBR dalam perspektif kolaboratif. Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Padat Karya terhadap MBR dinilai masih belum maksimal. Penelitian lainnya oleh Ratna Dewi Palupi (2020) yang berjudul "Motif Rumah Tangga Miskin dalam Penerimaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)", dalam penelitiannya menganalisis motif warga dalam menerima atau menolak program tersebut dengan menggunakan perspektif teori fenomenologi Alfred Schutz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif sebab dalam menerima program adalah kondisi ekonomi subjek penelitian yang tidak mampu dan memiliki keahlian menukang, adapun motif akibatnya adalah subjek penelitian ingin memiliki tempat yang nyaman untuk mereka dapat berjualan, memiliki rumah layak huni, yang mana terhindar dari banjir dan kebakaran. Sementara itu, terdapat pula motif sebab dan motif akibat dalam penolakan program, di mana motif sebab penolakannya adalah ketidakmampuan ekonomi subjek

penelitian, dan motif akibat yang menjadi dasar subjek penelitian menolak program adalah memilih untuk menunggu bantuan lain yang lebih sesuai dengan kondisi nya. Serangkaian penelitian terdahulu tersebut masih belum ada yang membahas dan menganalisis motif dari penolakan intervensi program pemberdayaan pemerintah, Padat Karya oleh warga miskin.

2.2 Fenomenologi Menurut Perspektif Alfred Schutz

Fenomenologi dipahami sebagai filsafat mengenai fenomena, namun tidak hanya sekedar renungan filsafati. Fenomena yang diulas dalam pengamatan fenomenologis merujuk pada suatu kejadian yang terkait dengan pengalaman-pengalaman keseharian manusia. Edmund Husserl menyebutnya sebagai *Lebenswelt* atau "dunia kehidupan", sementara Alfred Schutz selaku murid dari Husserl memperkenalkan ide tentang *social-world*. Alfred Schutz (1899-1959) memegang peran penting dalam perkembangan sosiologi fenomenologis. Dalam karya klasiknya yang berjudul *The Phenomenology of the Social World*, Schutz tertarik menggabungkan pandangan-pandangan fenomenologi dengan sosiologi melalui kritik sosiologis atas karya weber. Schutz menekankan bahwa reduksi fenomenologis meninggalkan kita dengan apa yang dia sebut sebagai suatu "*stream of experience*" (arus pengalaman). Konsep fenomenologis berarti studi tentang cara di mana fenomena, hal- hal yang kita sadari, muncul kepada kita, dan cara yang paling mendasar dari permunculannya adalah sebagai suatu aliran dari berbagai peristiwa indrawi yang secara berkelanjutan diterima melalui panca-indra. Menurut Schutz, cara manusia mengkonstruksikan makna di luar *stream of experience*, ialah melalui proses tipifikasi yang berupa proses abstraksi dan formalisasi untuk mengelompokkan benda-benda berdasarkan karakteristik tertentu. Hubungan antarmakna disusun melalui proses ini yang dikenal sebagai "*stock of knowledge*". *Stock of knowledge* merujuk pada kumpulan pengalaman yang kemudian mempengaruhi makna yang terkonstruksi dalam pemikiran, sikap, dan perilaku yang dapat diimplementasikan dalam realitas sehari-hari.

Schutz membedakan dua tipe motif, yakni motif "tujuan" (*in order to*) dan motif "sebab" (*because*). Motif pertama mengacu pada alasan di balik tindakan yang terarah pada masa yang akan datang, di mana setiap tindakan yang dilakukan oleh aktor memiliki tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Motif kedua mengacu pada latar belakang yang mendasari tindakan seseorang pada saat itu, menyoroti hubungan antara tindakan saat ini dengan pengalaman atau alasan dari masa lalu. Motif juga dapat diartikan sebagai dorongan yang terikat pada suatu tujuan. Motif merujuk pada hubungan sistematik antara respon dengan kondisi dorongan tertentu. Motif dalam diri individu akan memengaruhi cara mereka bertindak untuk mencapai sasaran kepuasan. Fenomenologi digunakan untuk mencari tahu motif yang mendasari warga miskin menolak intervensi Program Padat Karya. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang sub bab "Fenomenologi menurut perspektif Alfred Schutz" dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengidentifikasi dan menganalisis motif sebab dan motif tujuan dalam penolakan intervensi Program Padat Karya oleh warga miskin di Kelurahan Ujung.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan teori fenomenologi merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada pengamatan mendalam terhadap pengalaman individu serta upaya untuk memahami motif yang terkandung dalam pengalaman-pengalaman tersebut. Pendekatan fenomenologi menitikberatkan pada deskripsi dan pemahaman yang terperinci terhadap fenomena yang diamati, baik dalam konteks interaksi sosial maupun dalam lingkungan sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan pengalaman individu dalam berbagai aspek

kehidupan, termasuk interaksi dengan orang lain serta situasi-situasi tertentu yang dihadapi. Penelitian dilakukan di Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Subjek yang menjadi fokus penelitian ini terfokus pada kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin, yang mana sebelumnya telah diberikan tawaran untuk mendapatkan intervensi pekerjaan melalui Program Padat Karya, namun memutuskan untuk menolaknya. Selanjutnya, terdapat tiga langkah-langkah penting dalam proses pengumpulan data penelitian, yang diantaranya yaitu observasi, wawancara, dan studi literatur. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data konsep dari Miles&Huberman.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dinamika Warga Kelurahan Ujung Terhadap Program Padat Karya

Kelurahan Ujung menghadapi tantangan signifikan dalam pelaksanaan Program Padat Karya, dengan tingkat penolakan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kelurahan lain. Analisis terhadap data partisipasi menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara warga yang menolak dan mereka yang menerima program ini. Deskripsi berikut memberikan gambaran tentang dinamika warga terkait Program Padat Karya di Kelurahan Ujung, yang mana tanggapan warga terbagi menjadi menolak dan menerima. Penolakan terhadap Program Padat Karya di Kelurahan Ujung menunjukkan tingkat yang sangat tinggi. Meskipun data spesifik tentang jumlah pasti warga yang menolak program ini masih belum tersedia, wawancara dengan pihak kelurahan dan warga setempat mengindikasikan bahwa jumlahnya sangat signifikan dan mungkin mendominasi. Sementara dari data yang ada, diketahui bahwa 241 warga dikategorikan sebagai "tidak bisa diintervensi" karena alasan seperti usia, kondisi fisik, atau disabilitas, sementara 168 warga sudah memiliki pekerjaan dan tidak memerlukan intervensi lebih lanjut. Penolakan ini tampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sisi lain, penerimaan terhadap Program Padat Karya di Kelurahan Ujung sangat rendah, dengan hanya dua warga yang tercatat menerima dan masih berpartisipasi dalam program tersebut. Angka penerimaan yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa program mungkin tidak memenuhi ekspektasi atau kebutuhan mayoritas warga. Rendahnya tingkat penerimaan menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian Program Padat Karya agar lebih sesuai dengan kebutuhan warga serta meningkatkan komunikasi dan keterlibatan dengan masyarakat untuk memaksimalkan partisipasi di masa depan.

4.2 Motif Sebab (*Because Motive*) Warga Kelurahan Ujung dalam Menolak Program Padat Karya

Schutz dalam fenomenologinya menekankan pada pengalaman individu dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam mengungkapkan fenomena, Schutz menerapkan metode tipikasi yang berfokus pada tindakan dan motif. Schutz memperkenalkan konsep "*because of motive"* atau motif sebab, yang menjelaskan alasan yang terkait dengan sebab dari suatu tindakan yang diambil individu untuk mencapai kondisi yang diharapkan di masa depan. Motif sebab ini dapat dimaknai sebagai faktor yang mendasari individu dalam memilih tindakan tertentu. Pada penelitian ini, terdapat motif sebab warga Kelurahan Ujung menolak ataupun menerima Program Padat Karya.

A. Tekanan Ekonomi yang Mendesak

Motif yang satu ini merupakan motif yang memiliki dua sisi layaknya koin. Tekanan ekonomi yang mendesak bisa menjadi motif sebab di balik penolakan maupun penerimaan subjek terhadap Program Padat Karya. Pada beberapa kasus yang mana subjek memilih untuk menerima Program Padat Karya, motif tekanan ekonomi yang mendesak justru digunakan sebagai alasan untuk menerima. Bagi mereka yang menerima, Program Padat Karya dipandang sebagai angin segar yang

memberikan harapan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Berbeda dengan subjek yang menerima program ini, bagi subjek lain yang menolak program ini, tekanan ekonomi yang mendesak menjadi alasan yang membuat mereka tidak bisa menerima program ini.

Dalam konteks masyarakat miskin, tekanan ekonomi ini sering kali bersifat langsung dan mendesak, menuntut solusi yang cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Subjek yang hidup dalam kondisi kemiskinan akut sering kali berada dalam situasi di mana mereka tidak memiliki cadangan finansial atau sumber daya lain yang dapat diandalkan. Subjek sebagai warga miskin seringkali menghadapi permasalahan ekonomi yang mendesak, karena mereka cenderung tidak memikirkan masa depan yang lebih jauh, fokus mereka hanya pada pemenuhan kebutuhan hari ini. Hal ini menciptakan urgensi untuk mencari sumber pendapatan yang bisa segera diakses dan memberikan hasil dalam waktu singkat, sehingga warga miskin tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi dalam Program Padat Karya yang tidak mereka ketahui kejelasannya. Hari-hari subjek sudah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan fisiologis.

Selain itu, Program Padat Karya sering kali dipersepsikan sebagai tidak cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan subjek yang membutuhkan solusi cepat. Misalnya, jika program ini hanya memberikan upah yang dibayarkan setelah proyek selesai atau dalam jangka waktu tertentu, hal ini mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan subjek yang memerlukan uang tunai segera untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, subjek juga perlu mengikuti pelatihan di mana mereka tidak akan menerima penghasilan dan justru menuntut pengeluaran untuk transportasi. Subjek yang menghadapi tekanan ekonomi yang mendesak mungkin merasa bahwa waktu dan energi yang diinvestasikan dalam Program Padat Karya tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh, terutama jika mereka harus menunggu sebelum menerima upah.

B. Dorongan dari Pemerintah

Motif sebab selanjutnya bisa digunakan sebagai alasan untuk menolak program, sekaligus juga dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak program. Dalam salah satu kasus, subjek yang memutuskan untuk menerima program dipengaruhi oleh motif adanya dorongan dari pihak pemerintah. Wali Kota Surabaya secara pribadi melakukan kunjungan ke rumah subjek dan memberikan penawaran kepada subjek untuk mengikuti program tersebut. Dorongan dari pemerintah, dalam hal ini, berfungsi sebagai motif sebab yang mendorong keputusan subjek. Dalam hal ini, pengaruh langsung pemerintah menunjukkan bahwa intervensi personal dan strategi komunikasi yang efektif dari pihak pemerintah dapat meningkatkan partisipasi warga dalam program-program sosial.

Berbeda dengan subjek yang menerima program ini, bagi subjek lain yang menolak program ini, motif sebab tersebut tidak muncul. Dalam kasus ini, ketidakterlibatan atau kurangnya komunikasi langsung dari pihak pemerintah membuat subjek merasa tidak terdorong untuk berpartisipasi. Tidak adanya kontak langsung atau insentif personal dari pihak berwenang menghilangkan elemen dorongan yang kuat, yang dalam kasus sebelumnya berhasil mempengaruhi keputusan untuk menerima program. Dengan demikian, motif sebab yang berkaitan dengan kurangnya dorongan pemerintah menjadi alasan yang signifikan bagi mereka yang menolak program ini.

C. Status Pekerjaan

Status pekerjaan yang dimiliki oleh warga memainkan peran penting dalam menentukan sikap mereka terhadap partisipasi dalam Program Padat Karya. Keputusan untuk menolak program

ini dapat dilihat sebagai hasil dari pertimbangan rasional terhadap risiko dan keuntungan yang ditawarkan oleh program tersebut. Bagi subjek yang sudah memiliki pekerjaan, meskipun pekerjaan tersebut mungkin tidak ideal, ia menawarkan sesuatu yang pasti, yakni pendapatan yang sudah bisa diprediksi, lingkungan kerja yang sudah dikenal, dan mungkin juga relasi sosial yang telah terbentuk. Lebih lanjut, status pekerjaan yang sudah dimiliki oleh subjek juga berfungsi sebagai identitas sosial yang penting dalam komunitas mereka. Pekerjaan, meskipun informal, sering kali menjadi bagian dari rutinitas harian dan memberi mereka peran yang jelas dalam jaringan sosial mereka. Misalnya, seorang tukang becak, pedagang di pasar, atau juru masak mungkin sudah memiliki pelanggan tetap, relasi sosial, atau lokasi kerja yang mereka kenal baik. Program Padat Karya, yang mungkin memerlukan mereka untuk berpindah ke lingkungan kerja yang baru atau melakukan pekerjaan yang berbeda, dapat dilihat sebagai gangguan terhadap identitas dan jaringan sosial yang sudah mapan. Hal ini dapat menyebabkan resistensi terhadap program tersebut, karena subjek mungkin tidak ingin mengambil risiko kehilangan posisi atau status yang mereka sudah bangun melalui pekerjaan mereka saat ini.

Subjek yang sudah memiliki pekerjaan, meskipun di sektor informal, mungkin berada dalam posisi sosial di mana mereka lebih bergantung pada pekerjaan tersebut sebagai sumber penghidupan utama. Dalam situasi ini, Program Padat Karya mungkin dianggap sebagai langkah yang terlalu berisiko, terutama jika mereka tidak yakin apakah program tersebut dapat memberikan pendapatan yang lebih baik daripada pekerjaan yang sudah mereka miliki. Jika Program Padat Karya tidak dapat menjamin pendapatan lebih tinggi daripada pekerjaan yang sudah mereka miliki, subjek cenderung melihat program tersebut sebagai langkah yang tidak praktis. Mereka mungkin berpendapat bahwa mengikuti Program Padat Karya dapat mengganggu rutinitas dan pendapatan mereka yang sudah stabil, dan pada akhirnya, tidak memberikan keuntungan yang signifikan.

4.3 Motif Tujuan (*In-Order to Motive*) Warga Kelurahan Ujung dalam Menolak Program Padat Karya

Schutz mengartikan *"in order to motive"* atau motif tujuan sebagai alasan di balik tindakan seseorang yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tindakan individu tentu memiliki tujuan atau hasil yang ingin dicapai, dan motif ini didasarkan pada alasan seseorang untuk menciptakan atau mencapai kondisi yang diinginkan di masa depan Oleh karena itu motif tujuan pada dasarnya berorientasi pada masa waktu mendatang. Berdasarkan temuan data, terdapat motif tujuan yang mempengaruhi keputusan warga dalam menolak ataupun menerima Program Padat Karya.

A. Kebutuhan Untuk Mengurus Rumah Tangga

Penolakan subjek yang merupakan ibu rumah tangga terhadap Program Padat Karya sering kali berkaitan dengan tanggung jawab mereka dalam mengurus rumah tangga. Banyak subjek yang menghadapi keterbatasan waktu dan tenaga karena harus mengurus anak atau mengelola urusan rumah tangga lainnya. Bagi mereka, tanggung jawab rumah tangga adalah prioritas yang tidak bisa diabaikan, dan hal ini menjadi salah satu motif utama di balik penolakan mereka terhadap program tersebut. Motif "in-order-to" menggambarkan tujuan atau harapan mereka, yaitu mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus mengorbankan waktu dan perhatian yang diperlukan untuk keluarga.

Program Padat Karya, yang sering kali tidak menawarkan fleksibilitas dalam hal waktu dan lokasi kerja, dipandang sebagai penghalang bagi mereka yang memiliki tanggung jawab rumah tangga

yang signifikan. Sebagian besar subjek ibu rumah tangga yang menolak program ini adalah mereka yang merasa bahwa jadwal kerja yang ketat dan lokasi kerja yang jauh tidak memungkinkan mereka untuk memenuhi kewajiban keluarga secara efektif. Keterbatasan ini mengakibatkan munculnya pandangan bahwa Program Padat Karya tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Warga miskin yang menolak Program Padat Karya mungkin merasa bahwa program ini dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi khusus mereka sebagai individu yang memiliki tanggung jawab domestik yang besar. Posisi mereka dalam struktur sosial, sebagai kelompok yang sering kali tidak memiliki akses ke pengaturan kerja yang lebih fleksibel, membuat mereka merasa bahwa partisipasi dalam program ini tidak akan membantu memperbaiki keadaan ekonomi atau sosial mereka secara berarti.

B. Keinginan Untuk Mendapatkan Pekerjaan yang Stabil

Motif tujuan yang kedua, adanya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil membuat subjek memutuskan untuk menerima Program Padat Karya. Kondisi tanpa pekerjaan tetap atau pendapatan yang tidak stabil sebelumnya menjadi faktor pendorong utama yang membuat mereka melihat Program Padat Karya sebagai peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Kedua subjek yang memutuskan untuk mengikuti program ini berada dalam situasi ekonomi yang sulit, di mana mereka mengalami ketidakpastian pendapatan akibat pekerjaan serabutan atau pekerjaan yang tidak memberikan jaminan masa depan. Dalam konteks ini, partisipasi dalam Program Padat Karya dipandang sebagai upaya untuk keluar dari lingkaran ketidakpastian tersebut. Mereka percaya bahwa program ini dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Harapan akan stabilitas ekonomi ini didorong oleh keyakinan bahwa program tersebut dapat memberikan penghasilan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi mereka sebelumnya.

Bagi mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bawah, stabilitas pendapatan merupakan kebutuhan mendesak yang menentukan keputusan mereka untuk bergabung dengan Program Padat Karya. Pekerjaan yang stabil memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial atau keluarga besar. Subjek berharap bahwa dengan mengikuti Program Padat Karya, mereka akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka secara keseluruhan. Mereka melihat program ini sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka, seperti memiliki kehidupan yang lebih layak dan terhormat di mata masyarakat.

C. Berharap Bantuan Lain yang Lebih Sesuai

Motif tujuan selanjutnya subjek menolak untuk bergabung dalam Program Padat Karya yaitu adanya harapan untuk memperoleh bantuan lain yang lebih sesuai. Bagi sebagian besar subjek yang telah diwawancarai, partisipasi dalam Program Padat Karya dianggap tidak memberikan manfaat langsung yang mereka butuhkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi sehari-hari. Subjek lebih menginginkan bantuan dalam bentuk tunai atau program yang dapat segera meringankan beban biaya hidup. Bantuan tunai, misalnya, dipandang lebih fleksibel dan langsung bermanfaat, karena memungkinkan warga untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka, seperti membeli kebutuhan pokok, membayar sewa, atau menutupi biaya pendidikan anak. Subjek menolak program tersebut dengan tujuan mendapatkan bantuan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Mereka berharap bahwa dengan menolak partisipasi dalam Program Padat Karya, pemerintah atau lembaga lain akan menyediakan bantuan alternatif yang lebih langsung dan relevan, seperti bantuan tunai. Keputusan ini didasarkan pada pengalaman dan penilaian subjek terhadap

jenis bantuan yang mereka rasa paling efektif dalam memberikan dampak positif terhadap kehidupan mereka.

Preferensi subjek terhadap bantuan tunai daripada partisipasi dalam Program Padat Karya juga dapat dimaknai sebagai respons terhadap posisi mereka dalam struktur sosial. Sebagai kelompok yang berada dalam kelas ekonomi bawah, warga miskin sering kali merasa bahwa program seperti padat karya tidak memberikan keuntungan yang memadai bagi mereka. Mereka melihat bantuan tunai sebagai cara yang lebih cepat dan praktis untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka tanpa harus terlibat dalam pekerjaan yang mungkin kurang sesuai dengan kemampuan atau keahlian mereka. Secara keseluruhan, keputusan subjek untuk menolak Program Padat Karya dan berharap pada jenis bantuan lain yang lebih sesuai dapat dilihat sebagai hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk motif pribadi, pengalaman masa lalu, dan posisi mereka dalam stratifikasi sosial. Preferensi terhadap bantuan tunai mencerminkan harapan mereka akan solusi yang lebih konkret dan langsung untuk mengatasi kesulitan ekonomi sehari-hari. Dengan memahami motif di balik penolakan ini, kita dapat melihat bagaimana keputusan warga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan pengalaman historis mereka, serta harapan mereka terhadap bentuk bantuan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan mereka.

5. Kesimpulan

Program Padat Karya di Kelurahan Ujung menghadapi tantangan signifikan dalam menarik partisipasi warga. Program Padat Karya sendiri pada dasarnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, sehingga sasaran utama program ini adalah warga miskin. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa beberapa warga merasa Program Padat Karya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Warga merasa lebih terbantu oleh program bantuan sosial yang memberikan uang tunai atau sembako. Selain itu, meskipun terdapat banyak warga yang sebenarnya tertarik dan bersedia berpartisipasi dalam program ini, dalam praktiknya, banyak kasus di mana kesediaan mereka tidak mendapatkan tindak lanjut.

Banyak warga memilih menolak Program Padat Karya dengan berbagai motif yang dapat dikategorikan sebagai motif sebab (*because motive*) dan motif tujuan (*in-order to motive*). Motif sebab yang mempengaruhi penolakan meliputi ketidakpercayaan terhadap efektivitas program, tekanan ekonomi yang mendesak, kejelasan informasi yang rendah, dorongan yang kurang tepat dari pemerintah, dan status pekerjaan warga yang sudah ada. Di sisi lain, motif tujuan yang diidentifikasi mencakup keinginan untuk fleksibilitas kerja, kekhawatiran tentang stabilitas pekerjaan, kebutuhan untuk mengurus rumah tangga, harapan akan pekerjaan yang lebih baik, dan keinginan untuk mendapatkan bantuan lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Warga merasa bahwa program ini kurang relevan dengan kebutuhan nyata mereka dan lebih memilih bantuan langsung atau program lain yang menawarkan dampak lebih signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Program Padat Karya bukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pertimbangan sosial, psikologis, dan aspirasi pribadi warga.

Daftar Pustaka

[1] Amsal. (2018). *Eksistensi Kemiskinan Perkotaan dan Kebijakan Penanganannya.* Jakarta: Indocamp.

[2] Amsal. (2021). *Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.* Jakarta: Indocamp.

[3] Brodjonegoro, B. P., & et.al. (2007). *Pembangunan Perdesaan dan Daerah Pesisir Pada Era Milenium.*

[4] Dewanta, & dkk. (1995). *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia.* Yogyakarta: Aditya Media.

[5] Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2010, Oktober 25). *Penanganan Kemiskinan di Usia Jatim ke-65*. Dipetik January 4, 2024, dari https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/602

[6] Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2015, Juli 9). *PROGRAM PADAT KARYA TETAP JADI PRIORITAS PADA PABBD 2015*. Dipetik Januari 1, 2024, dari https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/45623

[7] Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. (2023, November 13). *Tiga Tahun Terakhir, Kemiskinan Ekstrem Jatim Turun 3,58% atau 1.480.140 Jiwa*. Dipetik Januari 16, 2024, dari https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/tiga-tahun-terakhir-kemiskinan-ekstrem-jatim-turun-3-58-atau-1-480-140-jiwa

[8] Farid, M. (2018). *FENOMENOLOGI Dalam Penelitian Ilmu Sosial.* Jakarta: KENCANA.

[9] N. L. Saputri, 'Sakit Hati Kerap Dimarahi, Suami Tega Bunuh Istri Lalu Kabur dan Berpindah-pindah Tempat', *Tribunnews.com*, Jakarta, p. 1, Dec. 14, 2020.

[10] Ghufron, M. N., & S, R. R. (2012). *Teori-Teori Psikologi.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

[11] Haryanto, S. (2012). *Spektrum Teori Sosial.* Jogjakarta: AR-RUZ MEDIA.

[12] Sadewo, F. S., Legowo, M., Supriyanta, & Harianto, S. (2012). *Pembangunan Untuk Keluarga Miskin (Kearifan Lokal dan Program Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Jawa Timur)).* Surabaya: Unesa University Press.

[13] Suparlan, P. (1984). *"Kemiskinan di Perkotaan" bacaan untuk Antropologi Perkotaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.